



Departemen Pendidikan Umum, FPIPS
Universitas Pendidikan Indonesia



SPADA
Sistem Pembelajaran
Daring

HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW

Oleh:

Tim Dosen **SPADA MKU**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN UMUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2021**



**UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA**
A Leading and Outstanding University

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Pengantar Perkuliahan

Apakah Indonesia pernah memiliki aturan tentang HAM?



Hak Asasi Manusia bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Meski baru diundangkan tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, sesungguhnya Indonesia pernah telah memiliki konstitusi yang secara lengkap membahas tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Lantas bagaimana pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dewasa ini? Untuk mengetahuinya kita akan uraikan dari mulai pengertian sampai usaha-usaha perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah.

Pengertian

Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia

Konseptual

Hak berarti milik atau kepunyaan.
Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu.
Asas berarti pokok, dasar atau utama. Asasi berarti yang dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang insan atau makhluk yang berakal budi

Hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, dan manusia

Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia sebagai pemberian dari Tuhan

Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa pun. Oleh sebab, manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia

Definisi



Pembagian Hak

Terdapat berapa macam hak yang ada pada seseorang?

Hak Manusia

Hak Umum Khusus

Hak khusus, timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia.

Hak Positif dan Hak Negatif

Suatu hak positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak memperlakukan orang lain dengan cara tertentu.

Hak Individual dan Sosial

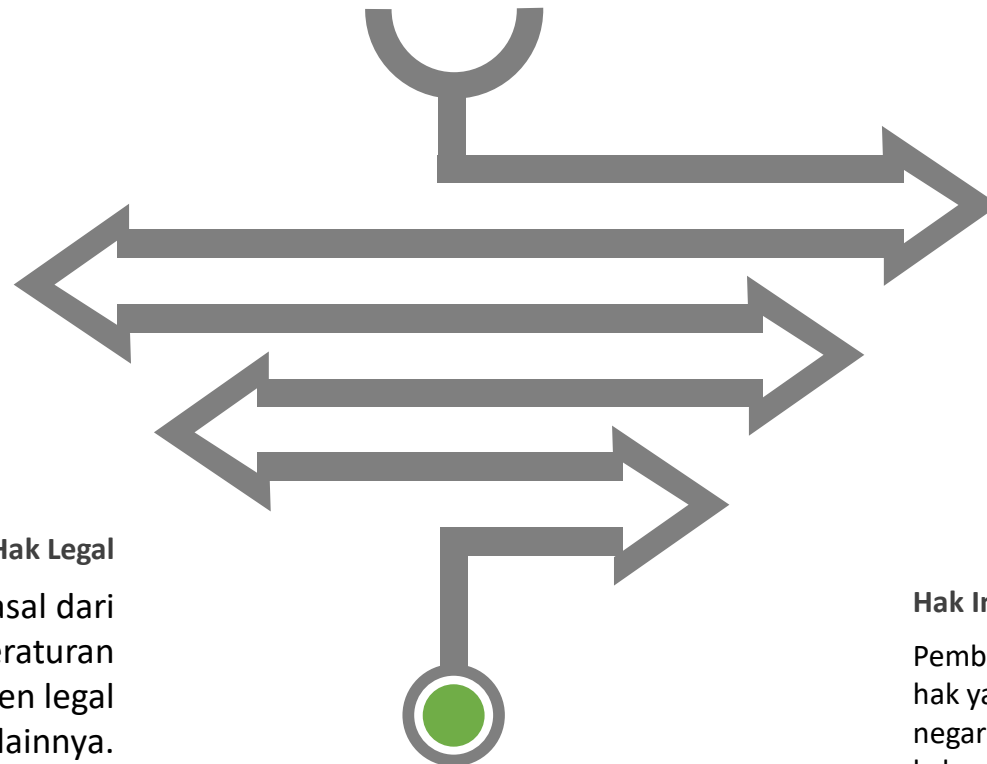
Pembagian hak ini disebabkan adanya hak yang dimiliki individu terhadap negara begitu juga dengan kelompok/organsiasi terhadap negara.

Hak Moral

Hak moral belum tentu hak legal. Contohnya, janji yang diadakan secara pribadi oleh dua teman, tidak menampilkan hak legal tetapi hanya sebatas hak moral saja.

Hak Legal

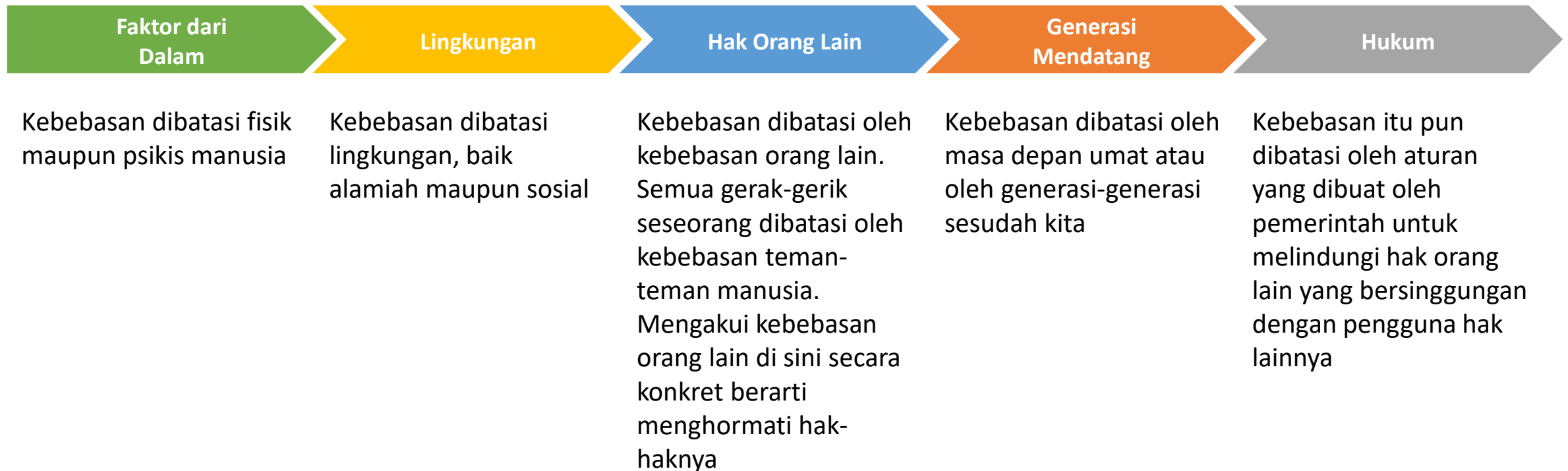
Hak-hak legal ini berasal dari undang-undang, peraturan hukum dan dokumen legal lainnya.





Batas HAM

Apakah Hak Asasi Manusia dibatasi?





hak asasi manusia adalah *hak*, tetapi tidak harus dalam pengertiannya yang kaku.

hak asasi manusia memiliki nilai justifikasi yang kuat yang berlaku di mana pun dan mendukung prioritasnya yang tinggi. Tanpa karakter ini, hak asasi manusia itu tidak dapat menyeberangi dan melampaui perbedaan kultural dan mengatasi klaim kedaulatan nasional.

hak asasi manusia merupakan norma berprioritas tinggi (*high-priority norms*). Artinya, pengingkaran terhadap hak asasi manusia hanya akan berbuah pada ketidakadilan dan realitas tidak manusiawi.

hak asasi manusia merupakan norma internasional yang mencakupi semua negara dan seluruh umat manusia dewasa ini.

hak asasi manusia merupakan patokan minimal (*minimal standards*). Mereka lebih memberi perhatian pada menghindari kekejaman dan kengerian daripada mencapai yang terbaik. Fokusnya adalah pemberian perlindungan secara minimal pada kebaikan hidup manusia.

Karakteristik HAM

Apa saja karakteristik Hak Asasi Manusia?

Hak asasi manusia bukan sekadar norma moral biasa yang diterapkan dalam hubungan interpersonal semata melainkan norma-norma politik yang berkaitan dengan bagaimana orang diperlakukan oleh negara dan institusi-institusinya

hak asasi manusia eksis sebagai hak moral dan/atau legal. Hak asasi manusia eksis sebagai norma bersama dalam kesadaran moral aktual manusia – yaitu sebagai norma moral absah yang didukung oleh penalaran yang kuat – selain juga sebagai hak legal baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional yang diakui dalam hukum internasional

hak asasi manusia sangat beragam dan banyak, bukan hanya segelintir. Apabila kita kaji lebih, pada hakikatnya, hak asasi manusia itu bertambah seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri.

Karakteristik

Hak Asasi
Manusia



Hak Dasar dari HAM

Apa saja hak-hak dasar dari HAM?

Hak-hak politik atau *"the political rights"*, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.

Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *"the social and cultural rights"*, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *"the procedural rights"*, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya

Hak asasi pribadi atau *"the personal rights"*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya.

Hak asasi ekonomi atau *"the property rights"*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual, serta memanfaatkannya.

Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut *"the rights of legal equality"*.

Hak-Hak
Dasar

Hak Asasi
Manusia

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara

Apakah kewajiban dan tanggung jawab negara kepada HAM?

Menghormati

Menghormati (*obligation to respect*), merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.

Melindungi

Melindungi (*obligation to protect*), merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.

Memenuhi

Memenuhi (*obligation to fulfill*), merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia.

Tambahan

Mengambil langkah-langkah (*to take steps*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan (*to promote*). Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*).



Rule of Law

Apa yang dimaksud dengan Rule of Law?

The rule of law, yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, memiliki tiga arti, atau dapat kaji dari tiga sudut pandang yang berbeda.

The rule of law berarti supremasi absolut atau dominasi hukum yang bertentangan dengan kekuasaan sewenang-wenang, dan meniadakan eksistensi kesewenang-wenang, eksestensi prerogatif, atau meniadakan keberadaan kekuasaan diskresi yang luas dari pemerintah.

The rule of law berarti kedudukan yang sama di depan hukum, atau kesetaraan semua orang pada hukum yang dilaksanakan melalui peradilan biasa. *The rule of law* dalam hal ini meniadakan ide kedudukan eksklusif para pejabat pemerintah atau pejabat lainnya dari kewajiban tunduk pada hukum yang mengatur warga negara atau bebas dari yuridiksi peradilan biasa.

The rule of law digunakan sebagai rumusan untuk mengungkapkan fakta bahwa hukum konstitusi, aturan-aturan yang di luar negeri umumnya merupakan bagian dari konstitusi, bukan merupakan sumber hukum tetapi konsekuensi hak-hak individu, sebgaimana ditentukan dan ditegakan melalui peradilan.



Pemerintah Demokratis di Bawah Rule of Law

Apa saja syarat pemerintah yang demokratis di bawah rule of law?

Kebebasan menyatakan pendapat

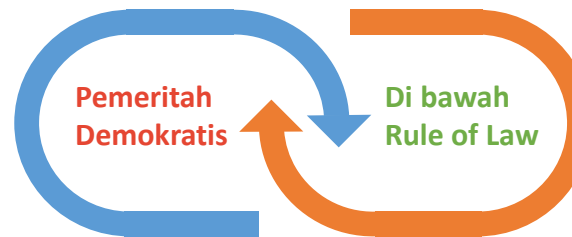
Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin

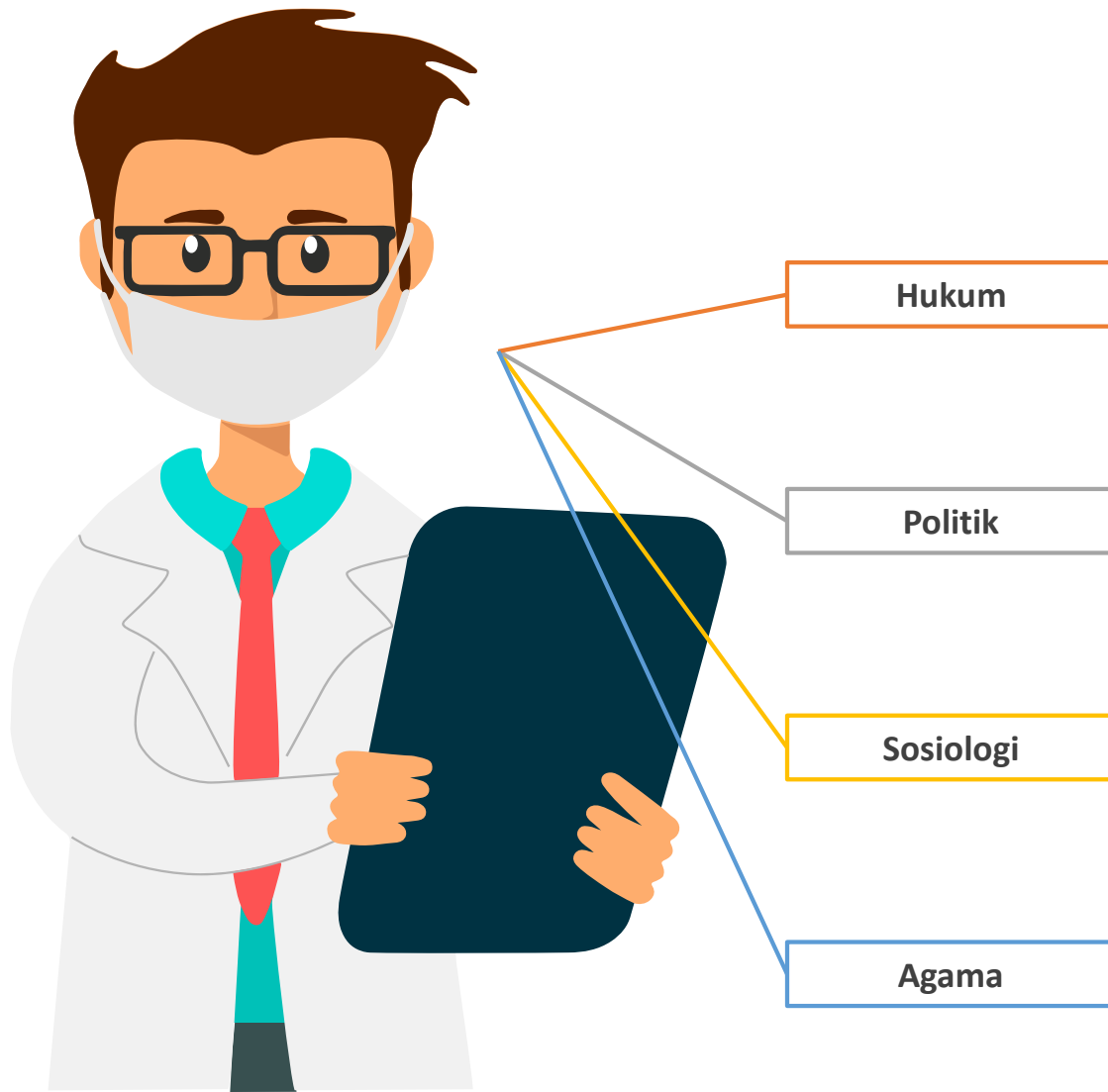
Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

Pendidikan kewarganegaran

Pemilihan umum yang bebas





Definisi Korupsi

Bagaimana definisi korupsi dari berbagai sudut pandang?

Korupsi merupakan kejahatan (*crime*), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Hukum Pidana Korupsi pada sejumlah Fakultas Hukum.

Korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar (*grand corruption*) dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Korupsi Birokrasi atau Korupsi Politik pada sejumlah fakultas Ilmu Politik.

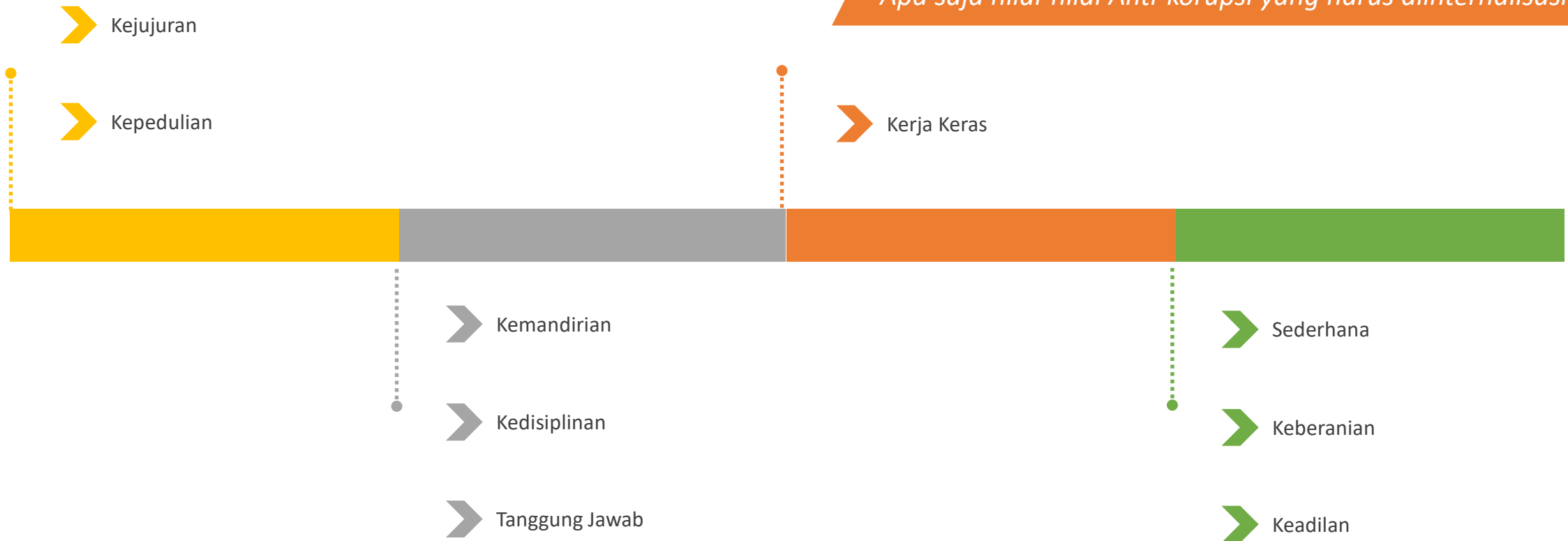
Korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Sosiologi Korupsi di sejumlah program studi Sosiologi atau Fakultas Ilmu Sosial.

Korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (*petty corruption*), apalagi korupsi besar (*grand corruption*). Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Korupsi dan Agama pada sejumlah Fakultas Falsafah dan Agama.



Nilai-nilai Anti-Korupsi

Apa saja nilai-nilai Anti-korupsi yang harus diinternalisasikan?





Departemen Pendidikan Umum, FPIPS
Universitas Pendidikan Indonesia



SPADA
Sistem Pembelajaran
Daring

Terima kasih ...

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN